



**PUSAT PENELITIAN
BADAN KEAHLIAN, SEKRETARIAT JENDERAL
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

**Hasil *Focus Group Discussion* Bidang Kesejahteraan Sosial
dalam Rangka Penelitian AKD**

**Tema/Judul tentang:
“IMPLEMENTASI KELEBIHAN DAN KEKURANGAN
PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI PADA MASA PANDEMI”**

Surabaya, 24 Maret 2021

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan pemerintah terkait dengan penyelenggaraan ibadah haji yang hingga saat ini masih menunggu keputusan resmi Pemerintah Saudi Arabia. Hal tersebut adalah (a) negara perlu hadir pada setiap tahap penyelenggaraan ibadah haji agar penyelenggaraannya dapat berjalan aman, nyaman, dan lancar, (b) terdapat beberapa risiko haji pada saat pandemi, yaitu risiko kesehatan jemaah, risiko kenaikan biaya, risiko pembatasan jemaah, dan risiko penundaan keberangkatan, (c) diperlukan sikap tegas pemerintah untuk segera memutuskan apakah akan memberangkatkan jemaah haji. Apabila akan memberangkatkan maka berapa kuotanya. Sikap menunggu pemerintah tersebut membuat persiapan ibadah haji menjadi memiliki dasar pijakan yang kuat (Perwakilan Kasi Haji Kabupaten/Kota se-Jatim), (d) jika pemerintah menyatakan siap melaksanakan penyelenggaraan ibadah haji maka kesiapan tersebut harus didasari oleh pertimbangan-pertimbangan yang matang. Mulai dari karantina jemaah, kapasitas asrama haji, hingga protokol kesehatan (Forum KBIHU Jatim), (e) pemerintah perlu memberikan bantuan dana penyelenggaraan manasik haji, karena dana penyelenggaraan manasik telah digunakan pada tahun 2020 namun batal berangkat. Apabila biaya dibebankan kepada jemaah maka akan memberatkan mereka (Forum KBIHU Jatim), dan (f) diperlukan regulasi tentang karantina prakeberangkatan jemaah haji (KKP Bandara Djuanda).